

EVALUASI PROGRAM PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA MISKIN DI KELUARAHAAN WONOREJO SURABAYA

Geiska Rievy Lupe Pinthor

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
pinthor45@gmail.com;

Indah Murti

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
endah@untag-sby.ac.id;

Anggraeny Puspaningtyas

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
anggraenypuspa@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Pedoman pemberian permakanan di kota Surabaya, peraturan walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan. Peraturan walikota ini bertujuan agar kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dapat dikelola secara, tertib, efektif, dan efisien serta dapat tepat sasaran. Penerima manfaat pelaksanaan pemberian permakanan adalah penduduk kota Surabaya yang termasuk golongan keluarga miskin yang terdiri dari orang lanjut usia, anak yatim/ piatu, dan penyandang cacat. Bahwa peneliti berfokus pada penerima bantuan permakanan dengan kriteria lanjut usia. Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Dalam arti spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, ketika hasil kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut mempunyai sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam lokasi penelitian ialah tempat dimana dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang ingin diteliti. Sedangkan situs penelitian adalah letak atau tempat penelitian yang mengungkapkan keadaan sebenarnya dari keadaan yang diteliti. Penelitian ini mengambil lokasi pada warga sekitar di daerah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Kata kunci: *Permakanan, Lanjut Usia, Evaluasi, Kelurahan Wonorejo*

A. PENDAHULUAN

Suatu program atau kebijakan yang diterapkan keberhasilannya sangat tergantung pada pelaksanaannya fungsi kepemimpinan yang mengerahkan dan menggerakkan sekelompok orang melalui kerjasama untuk mencapai tujuan, fungsi tertentu dalam koordinasi dan penyatuan bagian-bagiannya. Terdapat empat unsur dalam tahapan fungsi administrasi yaitu perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan pelaksana, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Tingkatan ini saling bergantung dan saling melengkapi yang memberikan umpan balik atau masukan bagi tahapan kebijakan lainnya, termasuk jaminan sosial

Kesejahteraan sosial diadakan untuk melindungi warga yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari. Program permakanan untuk lansia diterbitkan di Kota Surabaya bermula pada tahun 2012 dengan tujuan guna membantu para Penyandang Kesejahteraan Masalah Sosial (PKMS) dan sebagai bantuan sosial untuk warga Kota Surabaya upaya dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Berjalannya program bantuan pemberian makanan ini awalnya dilakukan oleh Dinas Sosial Surabaya dari tahun 2012, para warga mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan pemberian makanan yang bersurat dari RW ditujukan kepada Dinas Sosial dan Walikota Surabaya dan beralih kepada Kelurahan setempat. Pemkot Surabaya dengan Dinsos telah merumuskan program untuk membantu dan menaikkan kualitas hidup lansia melalui bantuan pangan, dimana pelaksanaan program sesuai instruksi pada Perwali Nomor 32 Pemberian Bantuan Makanan Lansia Miskin dan Terlantar Tahun 2012.

Warga yang umumnya telah mencapai 60 (enam puluh) tahun lebih atau lanjut usia, yang termasuk dalam keluarga miskin, keluarga tidak mampu tidak bekerja maupun tidak berpenghasilan bahkan yang sudah tidak memiliki kerabat, dan tidak dapat untuk memenuhi kebutuhannya dengan baik, terdaftar dalam database Keluarga Miskin yang diverifikasi oleh Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya kriteria kemiskinan ditemukan dari inspeksi Kelurahan dan Kecamatan, lansia terlantar menerima pemberian makanan dari Dinas Sosial Kota Surabaya untuk menunjang penghidupan mereka. Pembagian makanan memberi makan lansia sangat miskin dan terlantar 1 (satu) kali sehari, dengan porsi kotak makanan senilai Rp. 11.000,00 (Sebelas Ribu Rupiah) per orang dan per hari. Pelaksanaan kegiatan membagikan bantuan dijalankan oleh para kelompok masyarakat dan juga petugas kirimnya. Kelompok masyarakat yang dimana dalam Peraturan Walikota Nomor 134 Tahun 2022 melingkupi berbagai pelaksana yaitu, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) dari Kelurahan Wonorejo, panti sosial, petugas masak dari Kelurahan yaitu para kelompok masyarakat masing-masing dikerjakan oleh warga Kelurahan itu sendiri dan juga petugas kirimnya dari kelurahan tersebut. Penduduk lansia yang tepatnya berada di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk jumlah penerima manfaat dari beberapa tahun ke belakang sebanyak:

Tabel: Jumlah Penerima Permakanan

Permakanan di Tahun	Jumlah Penerima
2020	46
2021	187
2022	175

Sumber: Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

Program permakanan yang sudah berjalan cukup lama dimulai tahun ke tahun yang berawal bagi lanjut usia yaitu mulainya di tahun 2012 Pedoman Pemberian Makanan Bagi Lansia Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2012 yang memberikan bantuan untuk lanjut usia miskin dan terlantar saja, selanjutnya ditahun yang sama 2012 adanya pembaruan Perwali tersebut yaitu Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2012 menyatakan Pedoman Pemberian Makanan bagi Lanjut Usia dan Penyandang Cacat (PACA) bagi Keluarga Miskin, di tahun 2016 terdapat perubahan dalam pemberian bantuan yaitu penambahan sasaran bagi anak yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang orang tuanya telah meninggal yatim/ piatu didalan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016, pada akhir tahun 2019 adanya wabah virus yang masuk di Indonesia yaitu virus Covid-19, para warga terpaksa harus menjaga jarak, mengurangi kontak fisik, wajib menggunakan hand santizer dan mengenakan masker agar tidak tertular virus tersebut, masuk ke tahun berikutnya program permakanan masih tetap berjalan dengan perubahan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2020 pembaruan bagi penerima bantuan makanan penambahan sasaran bagi kepada warga yang terkena Covid-19. Program permakanan ini sudah berjalan cukup lamanya yang dimulai dari Dinas Sosial Surabaya menjalankan program permakanan selanjutnya dialihkan kepada seluruh Kelurahan di Surabaya, dan sampai saat ini menggunakan Perwali Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, anak yatim, piatu/ atau yatim piatu umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun ditinggalkan salah satu atau kedua orang tua kandungnya, dan penyandang cacat yang mengalami keterbatasan fisik di Kota Surabaya.

Pelaksanaan program bantuan permakanan di Surabaya, diterbitkan Pemkot pada tahun 2012 bertujuan untuk membantu warga Penyandang Kesejahteraan Masalah Sosial (PKMS) dan juga berupaya memberi bantuan sosial kepada warga dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pangan. Pelaksanaan program pemberian makanan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada awal tahun 2023 berjalannya pemberian permakanan kepada warga Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya kini ada perubahan dalam pelaksanaan program permakanan yang dulunya karang werdha & Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat agar didistribusikan menjadi permakanan, dan laporan data disampaikan kepada Kelurahan, dari Kelurahan mengirim laporan kepada Kecamatan yang dituju kepada Dinas Sosial, kini berubah diawal 2023 Kelurahan Wonorejo tidak lagi menjalankan program permakanan dan bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan makanan kepada lansia di wilayah Wonorejo jika program permakanan ini masih dijalankan ditahun 2023 ini.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti melakukan penelitiannya mengenai Evaluasi Kebijakan Perwali dengan judul “Evaluasi Permakanan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Wonorejo Surabaya”. Setelah adanya program bantuan pemberian makanan, bagaimana berjalannya alur pelaksanaan bantuan Perwali ini bagi lansia yang berada tepatnya di wilayah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.

B. KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Mengenai pengertian kebijakan ini, (William N. Dunn, 2003) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari Bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Selanjutnya, Dunn menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu *polis* (negara-kota) dan dikembangkan dalam Bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah public atau administrasi pemerintahan. Agar pengertian tersebut dapat dipahami secara lebih komprehensif, penjelasan Singadilaga (2001: 5) berikut ini.

- a. Kebijakan Publik, yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (*set of choosing*) yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.
- b. Pelaku Kebijakan, adalah orang, sekumpulan orang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu dalam kebijakan sebab mereka berada dalam posisi memengaruhi, baik pada perumusan kebijakan, pembuatan, pelaksanaan, maupun pengawasan penilaian atas perkembangan pelaksanaannya.
- c. Lingkungan Kebijakan adalah keadaan yang melatarbelakangi atau kejadian yang menyebabkan timbulnya sesuatu *issues* atau masalah kebijakan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri. Agar pengertian tersebut dapat dipahami secara lebih komprehensif, penjelasan Singadilaga (2001: 5) berikut ini.
- d. Kebijakan Publik, yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (*set of choosing*) yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.
- e. Pelaku Kebijakan, adalah orang, sekumpulan orang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu dalam kebijakan sebab mereka berada dalam posisi memengaruhi, baik pada perumusan kebijakan, pembuatan, pelaksanaan, maupun pengawasan penilaian atas perkembangan pelaksanaannya.
- f. Lingkungan Kebijakan adalah keadaan yang melatarbelakangi atau kejadian yang menyebabkan timbulnya sesuatu *issues* atau masalah kebijakan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah kebijakan merupakan tindakan secara sadar dan sistematis, dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan selangkah demi selangkah. Kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari analisis secara sistematis. Ini dikarenakan analisis kebijakan, merupakan upaya untuk menghasilkan dan

mentransformasikan informasi yang dibutuhkan untuk suatu kebijakan dengan menggunakan berbagai metode penelitian dan pembahasan dalam kondisi tertentu untuk menyelesaikan masalah. Pernyataan tersebut menunjukkan, analisis kebijakan lebih banyak memperhatikan yang digunakan untuk menganalisis dan menilai kebijakan dalam kaitannya dengan masukan, keluaran, serta hal-hal yang mendasar dari kebijakan tersebut. Dalam membahas analisis kebijakan dapat digunakan tiga macam pendekatan (William N. Dunn, 2003).

a. Pendekatan empiris

Pendekatan yang berkenaan dengan penggambaran sebab dan akibat dari kebijakan yang lalu, serta memberikan gambaran pada masa lalu tentang hasil yang diperoleh dari diberlakukannya kebijakan tersebut. Dalam pendekatan empiris, pertanyaan utamanya ialah, apakah segala sesuatu itu ada jenis informasi yang dihasilkannya adalah berciri *designative* (mengindikasikan atau menunjukkan).

b. Pendekatan evaluatif,

Pendekatan yang berurusan dengan penentuan makna atau nilai dari kebijakan pada masa lalu. Pertanyaannya ialah apa makna dari kebijakan tersebut dan jenis informasi yang dihasilkan bercirikan *evaluative*.

c. Pendekatan normatif

Pendekatan yang berkenaan dengan rekomendasi untuk masa yang akan datang, dari bentuk-bentuk tindakan yang mungkin bisa memecahkan masalah. Pertanyaannya ialah, apa yang seharusnya dilakukan, dan jenis informasi yang dihasilkan bersifat *advokatif* (mendukung, membantu).

Dalam penulisan penelitian ini peneliti menggunakan teori Evaluasi (William N. Dunn, 2003) sebagai pisau analisis penelitian di lapangan.

Evaluasi Kebijakan

Teori evaluasi dan teori ilmu sosial mempunyai pengaruh penting terhadap evaluasi program modern. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Shadish dalam pidatonya yang berjudul *Evaluation Theory is Who We Are* menyatakan bahwa semua evaluator harus mengetahui teori evaluasi sebab teori adalah sentral untuk identitas profesional para peneliti. Teori evaluasi merupakan inti dari pada identitas peneliti itu sendiri. Setiap profesi memerlukan dasar pengetahuan yang unik, dan bagi para evaluator teori evaluasi merupakan ilmu pengetahuan itu. Pendapat ini kemudian juga didukung oleh beberapa pakar lainnya yang menganggap begitu pentingnya teori digunakan dalam studi evaluasi (Alkin; Chen; Donaldson; Fetterman; Lipsey; Mark; Rossi; Freeman; Shadish; Cooc; Campbell dan Weiss, 2006). Adapun untuk sebagian pakar yang menyatakan bahwa studi evaluasi tidak memerlukan teori evaluasi. Sebagaimana yang diungkap oleh Michael Scriven menyatakan bahwa evaluasi tidak membutuhkan teori. Scriven menyatakan bahwa evaluator mungkin melakukan evaluasi program dengan baik tanpa mempergunakan teori evaluasi atau teori program, (Wirawan, 2012:31-32).

Ditinjau dari segi tujuan studi evaluasi bahwa tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki, dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut. Beberapa pakar lebih terperinci menjelaskan tujuan dari evaluasi yakni evaluasi

untuk mengukur pengaruh program terhadap masyarakat; menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; mengukur apakah pelaksanaan program, sesuai dengan standar; untuk mengidentifikasi mana dimensi yang berjalan mana yang tidak berjalan; apakah memenuhi ketentuan undang-undang; mengukur cost effectiveness dan cost efficiency; mengambil keputusan mengenai program; memberikan feedback bagi pimpinan dan staff dan mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi (Dunn : 2000, Weiss : 1998, Shadish : 1998, Posvavac dan Carey : 1997 Soetari : 2014, Wirawan : 2012).

Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan harus merupakan jawaban terhadap pemenuhan berbagai kebutuhan, aspirasi, masalah, serta nilai-nilai sosial dan moral masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik bila pemerintah mampu menyusun suatu kebijakan publik yang tepat dan relevan. Suatu masalah mempunyai bobot kebijakan publik apabila:

- a. Menyangkut kehidupan orang banyak
- b. Megharuskan adanya pemecahan oleh pemegang kekuasaan yang memiliki mandate dari masyarakat
- c. Mengharuskan digunakannya sumber daya yang tersedia di masyarakat

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Dalam arti spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, ketika hasil kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut mempunyai sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna.

Sifat evaluasi menghasilkan tuntunan yang bersifat evaluatif, karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari analisis kebijakan lainnya:

- a. Fokus nilai evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan kebijakan atau program, evaluasi berbeda dengan pemantauan.
- b. Fakta nilai untuk mengetahui apakah kebijakan atau program tertentu mencapai kinerja yang tinggi, harus didukung oleh bukti bahwa hasil kebijakan berharga bagi individu, kelompok atau seluruh masyarakat.
- c. Hasil sekarang dan hasil masa lalu evaluasi bersifat perbandingan hasil sekarang dan hasil yang telah terjadi pada masa lalu

Dalam Perkembangannya, evaluasi sangat diperlukan dalam melihat kinerja dari kebijakan/ program itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Edward A. Suchman (dikutip dari Winarno, 2002: 196) menyatakan enam langkah dalam mengevaluasi suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- b. Analisis terhadap masalah.
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Subarsono (2011: 120-121) menjelaskan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yakni:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan, salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan, pada tahap lebih lanjut ditunjukkan untuk melihat dampak baik positif maupun negatif dari suatu kebijakan.
- e. Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dengan cara membandingkan tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang, tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Untuk mengetahui sejauh mana Program Permakanan di Surabaya telah mencapai hasil yang diharapkan maka penelitian ini menggunakan pendekatan teori (William N. Dunn, 2003), dimana mengembangkan enam indikator atau kriteria evaluasi mencakup sebagai berikut:

- a. Efektivitas: untuk mengetahui apakah hasil yang diinginkan telah tercapai sesuai dengan Peraturan Walikota No.134 Tahun 2022.
- b. Efisiensi: untuk mengetahui usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal.
- c. Kecukupan: untuk mengetahui seberapa jauh hasil dapat memecahkan masalah.
- d. Perataan: berhubungan dengan kewajaran dalam mendistribusikan kepada sasaran yang dituju.
- e. Responsivitas: untuk mengetahui bagaimana hasil kebijakan dapat memuaskan kebutuhan.

Ketepatan: merupakan penilaian keberhasilan suatu kebijakan apakah sudah tepat (William N. Dunn, 2003)

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam (Sofaer, 1999). Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai terkait permasalahan yang akan ditelitinya.

Menurut Moleong (2014:97) fokus penelitian yaitu inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Fokus penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang tertera didalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Indikator Evaluasi Program

Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Sangat Miskin di Kota Surabaya Kelurahan Wonorejo.

Menurut (William N. Dunn, 2003) istilah evaluasi mempunyai arti berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program dalam arti yang spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Kriteria Evaluasi sebagai berikut:

- a. Efektivitas: untuk mengetahui apakah hasil yang diinginkan telah tercapai sesuai dengan Peraturan Walikota No.134 Tahun 2022.
- b. Efisiensi: untuk mengetahui usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal.
- c. Kecukupan: untuk mengetahui seberapa jauh hasil dapat memecahkan masalah.
- d. Perataan: berhubungan dengan kewajaran dalam mendistribusikan kepada sasaran yang dituju.
- e. Responsivitas: untuk mengetahui bagaimana hasil kebijakan dapat memuaskan kebutuhan.
- f. Ketepatan: merupakan penilaian keberhasilan suatu kebijakan apakah sudah tepat (William N. Dunn, 2003).

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang ingin diteliti. Sedangkan situs penelitian adalah letak atau tempat penelitian yang mengungkapkan keadaan sebenarnya dari keadaan yang diteliti. Penelitian ini mengambil lokasi pada warga sekitar di daerah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Teknik pengumpul data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013:224). Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

Wawancara

Menurut Esterbag (dalam Sugiyono, 2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diskonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini digunakan wawancara secara langsung dengan 8 (delapan) informan yaitu, 1 (satu) petugas Dinas Sosial, 1 (satu) petugas Kelurahan Wonorejo, 1 (satu) Ketua Kelompok Masyarakat, dan 5 (lima) warga lansia penerima manfaat permakanan. untuk mendapatkan informasi yang tepat dan valid sehingga dapat membantu pengumpulan data dan dapat menyelesaikan masalah. Melakukan wawancara dengan infoman yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, menyusun daftar pertanyaan yang dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Narasumber yang dipilih dapat memberikan informasi dan data yang valid serat dapat dipertanggung jawabkan.

Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2013:145) observasi merupakan suatu roses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan

dan ingatan. Penulis melakukan observasi langsung di daerah sekitar Kelurahan Wonorejo Surabaya. Penulis juga melakukan observasi ke setiap data yang digunakan pada lokasi penelitian

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

D. PEMBAHASAN HASIL

Pada hasil penelitian dan pembahasan ini, diuraikan mengenai hasil observasi, hasil wawancara, hasil kajian pustaka mengenai Evaluasi Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Wonorejo Surabaya. Studi tentang Evaluasi Program Permakanan untuk mengetahui evaluasi berjalannya Program Walikota No 134 Tahun 2022 Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Dinas Sosial Kota Surabaya adalah sebuah instansi pemerintahan yang memiliki peran dalam menanggulangi dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul dimasyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial bagi warga Surabaya. Pelayanan oleh pemerintahan sering pula disebut pelayanan umum yang diberikan instansi pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan sosial.

Kelurahan Wonorejo merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam pelayanan penduduk untuk melayani masyarakat pada bidang kependudukan keperluan surat menyurat, pembuatan surat izin, bantuan sosial, pembuatan Kartu Keluarga, Ahli Waris, Kartu Tanda Penduduk, dan lain-lain. Kantor Kelurahan Wonorejo merupakan perangkat daerah dari salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yang terdiri dari RW-01 sampai RW-11 dan 73 RT.

Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) adalah kelompok masyarakat Wonorejo sebagai kerjasama mengkoordinasi, dan bertukar informasi. Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan Wonorejo yang disebut kelompok masyarakat dengan nama Kelompok Masyarakat Mulya jaya bertugas dalam program permakanan yaitu sebagai, pengirim laporan, memasak dan mendistribusikan kepada warga kelurahan wonorejo para penerima manfaat dalam bantuan pemberian permakanan, dan memantau program permakanan.

Para lanjut usia warga Kelurahan Wonorejo yang sudah masuk usia rentan dan berhak atas jaminan sosial dihidupnya. Bantuan permakanan kepada lansia adalah orang yang berumur 60 tahun keatas dan masuk kriteria keluarga miskin, dan terdata pada data Keluarga Miskin dari Dinas Sosial Surabaya dan diusulkan dari kelurahan.

Dalam menganalisis hasil penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan teori Dunn (2003) Evaluasi Kebijakan 6 (enam) dimana ada berbagai nilai yang pertama efektivitas, kedua efisiensi, ketiga kecukupan, keempat perataan, kelima responsivitas, dan keenam ketepatan, dianalisis untuk mengetahui informasi.

Wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dilakukan pada bulan April tahun 2023 yang melibatkan 8 (delapan) informan yaitu, Petugas Dinas Sosial, Staff Kelurahan Wonorejo, Ketua Kelompok Masyarakat Mulyajaya, dan 5 (lima) orang lansia penerima bantuan permakanan.

Efektivitas

Efektivitas untuk mengetahui apakah hasil yang diinginkan telah dicapai. Berjalannya program permakanan di wilayah wonorejo sudah dijalankan Pemkot Surabaya sejak tahun 2012 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Penyandang Kesejahteraan Masalah Sosial (PMKS) dan sebagai jaminan sosial bagi warga. Didapatkannya informasi yang diberikan oleh Dinas Sosial pada tahun 2023, warga penerima bantuan permakanan di seluruh Kelurahan Surabaya sudah mencapai 18.818 penerima yang terdiri lansia sebanyak 11.910, penyandang cacat sebanyak 3.633, dan anak yatim piatu miskin dan terlantar sebanyak 3.275, di kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari sebanyak 128 penerima manfaat yang terdiri dari lansia 111, penyandang cacat 8, dan anak yatim/ piatu 9. Tujuan program permakanan dengan pedoman Peraturan Walikota Surabaya No 134 Tahun 2022 ialah pemberian makanan kepada keluarga miskin dan 3 kriteria yaitu anak yatim/ piatu, penyandang cacat, dan Lanjut usia. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Katemi lansia berusia 77 tahun mengenai bantuan pemberian permakanan bahwa: *“Program permakanan ini sangat membantu bagi saya karena mendapatkan makanan gratis setiap harinya.”* (wawancara pada tanggal 12 April 2023).



Gambar 4.1 Stiker penerima bantuan keluarga miskin ditempel di rumah mereka sebagai tanda pemberian bantuan

Sumber: Peneliti 2023

Pemberian bantuan permakanan yang dibagikan 1 (satu) kali dalam setiap harinya untuk diberikan kepada keluarga miskin dan tergolong kriteria anak

yatim/ piatu belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang sudah ditinggalkan orang tuanya dengan menunjukkan salah satu akta kematian atau surat kematian, penyandang cacat (PACA) merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, dan para lanjut usia ialah seorang yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih. Sebagaimana tampak pada gambar di atas adalah stiker bagi para penerima bantuan permakanaan.

Penyaluran bantuan permakanaan yang dibagikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu merupakan tujuan dari program permakanaan. Program ini terus dipertahankan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan harapan agar memenuhi kebutuhan dasar warga miskin bisa mendapatkan makanan setiap hari. Seperti yang diungkapkan pegawai Dinas Sosial Surabaya mengenai permakanaan untuk keluarga miskin bahwa: *“Untuk mendapatkan bantuan permakanaan, calon penerima harus masuk kriteria keluarga miskin/ rentan miskin (wawancara pada tanggal 10 April 2023).*

Dengan upaya meringankan beban keluarga miskin yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilannya kurang dari Rp. 1.500.000, terutama bagi yang mereka masuk usia kurang produktif warga miskin bisa mendapatkan makanan gratis setiap hari. Dalam ungkapan oleh Bapak Tohir lansia berusia 68 tahun mengenai bantuan makanan gratis setiap harinya: *“Sangat membantu saya karena tidak mempunyai penghasilan dan diberikan makanan gratis” (wawancara pada tanggal 12 April 2023).*

Efisiensi

Efisiensi untuk pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil optimal, di wilayah wonorejo berjalannya permakanaan ini diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya yang menjelaskan tentang Pedoman Pelaksanaan Permakanaan Peraturan walikota ini bertujuan agar kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) agar dikelola semestinya agar sesuai sasaran. Perwali Nomor 134 Tahun 2022. Dalam wawancara dengan petugas Kelurahan Wonorejo mengenai pengelolaan dana bahwa:

“Dana dari DINSOS langsung di kirim kepada kelompok masyarakat, tugas kelompok masyarakat adalah yang pertama mengurus mendata usulan lansia, paca (penyandang cacat), dan yatim, kedua produksi caterin/ yang memasak, ketiga mendistribusikan bantuan makanan tersebut, keempat mendata penerima manfaat yang meninggal dll dilaporkan kepad kelurahan” (wawancara pada tanggal 12 April 2023).

Untuk di tahun sebelumnya tepatnya 2022 permakanaan masih ditangani oleh setiap kelurahan, namun tahun 2023 permakanaan akan diahlikan ke Dinas Sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Petugas Dinas Sosial: *“Kenapa sudah tidak di kelurahan lagi, karena adanya perintah dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menjadikan permakanaan sebagai bantuan sosial” (wawancara pada tanggal 10 April 2023).*

Distribusi program pemberian makanan atau permakanaan kelurahan apakah masih terlibat. Berdasarkan ungkapan petugas Kelurahan Wonorejo bahwa: *“Dalam pelaksanaan program permakanaan di tahun 2023 ini Kelurahan masih terlibat, sebagai pengajuan dan juga semisal bila adanya lansia yang tutup usia*

kelurahan sebagai monitoring berjalannya program permakanan di wilayah Wonorejo” (wawancara pada tanggal 12 April 2023).

Pada akhir tahun 2022 terdapat 175 lansia penerima permakanan mengapa ditahun 2023 adanya penurunan menjadi 111. Petugas Kelurahan Wonorejo mengungkapkan bahwa:

“Waktu tahun 2022 terdapat 175 jiwa lansia penerima bantuan, terus ditahun 2022 akhir kelurahan disuruh verifikasi ulang program permakanan untuk lansia yaitu lansia tunggal (infonya mau dikasih bantuan dari Kementerian Sosial – Pusat), dan lansia yang bersama keluarga diberi bantuan oleh Dinas Sosial, terus data verifikasi tersebut sudah dikasih ke kecamatan, kecamatan diteruskan Dinas Sosial. Tahun 2023 lansia yang terdaftar lansia tunggal, tidak mendapatkan bantuan permakanan, akhirnya banyak lansia yang tidak mendapatkan bantuan permakanan di tahun 2023 yang sebelumnya pernah mendapatkan di tahun 2022, pada bulan februari 2023 lansia yang membutuhkan bantuan permakanan di usulkan ulang ke Dinas Sosial Kota Surabaya melalui kecamatan, dan ada juga beberapa lansia yang sudah tutup usia” (wawancara pada tanggal 12 April 2023).

Bagaimana pengiriman laporan jika sudah tidak dilaporkan datanya lagi oleh kelompok masyarakat kepada kelurahan. Seperti yang diungkapkan petugas Kelurahan Wonorejo bahwa: “Untuk pengiriman laporan sudah tidak lagi dari kelompok masyarakat, ke kelurahan, kecamatan, dan dituju DINSOS, pada tahun 2023 Dinas Sosial membuat website permakanan sebagai pengiriman laporan, jadi tidak lagi butuh stempel terus dikirim ke kecamatan, dan dituju kepada Dinas Sosial, menggunakan teknologi lebih efisien” (wawancara pada tanggal 12 April 2023). Berikut adalah dashboard program permakanan di tahun 2023:

No.	Nama Pakmas	Kelurahan	Kuota Awal	Kuota Hari ini	Jumlah Porsi	Aksi
1	Kelompok Masyarakat Mulya Raya	WONOREJO TEGALSARI	128	118	118	Detail
Total			128	117	118	

Gambar 4.2 Dasboard website permakanan 2023
Sumber: Kelurahan Wonorejo 2023

Dalam penggunaan sistem online tentunya ada beberapa kendala yang dialami para Kelompok Masyarakat. Dalam wawancara bersama ketua kelompok masyarakat bahwa: “Pengiriman laporan lewat online, pengguna merasa kesulitan

jika laporan tidak segera diupload lansia tidak terverifikasi” (wawancara pada tanggal 12 April 2023). Gambar berikut adalah surat permohonan pengaktifan kembali:

POKMAS MULYA JAYA
KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN TEGALSARI
KOTA SURABAYA
Sekretariat : Jl. Wonorejo IV / 48 Surabaya

Surabaya, 11 April 2023

Nomor : 012/Mulya Jaya/IV/2023
Kepada Yth.
Perihal : Permohonan Pengaktifan Penerima Pejabat Pembuat Komitmen
Manfaat Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan di SURABAYA

Bersama ini dimohon dengan hormat bantuaannya untuk pengaktifan penerima manfaat permakanan tahun 2023 atas nama :

Nama : SUKRIYAH
NIK : 3578055205560004
NIPM : L.9.27.5.059
Alamat : Tempel Sukorejo 1 / 119 B
Keterangan : Petugas kirim salah Ngeklik

Demikian atas perhatian dan bantuaannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kelompok Masyarakat "Mulya Jaya"
Kusumawati

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 4.3 Permohonan pengaktifan Kembali penerima manfaat
Sumber: IPSM Kelompok Masyarakat Mulya Jaya 2023

Penggunaan media online belum tentu juga dapat berjalan lancar, adanya dampingan dan adaptasi menggunakan sarana online dapat membantu juga dalam pengiriman laporan harian yang dikirim langsung kepada Dinas Sosial.

Kecukupan

Kecukupan dalam nilai evaluasi menurut Dunn, merupakan ukuran seberapa jauh tingkat efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan, nilai atau kesempatan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada suatu kebijakan, program Perumahan di Kelurahan Wonorejo untuk mendistribusikan perumahan harus sesuai dengan sasaran yaitu, kepada lanjut usia. Seperti yang diungkapkan Bu Sulasmi lansia berusia 68 tahun apakah merasa tercukupi: *“Dengan adanya perumahan saya merasakan banyak manfaatnya karena dibantu segi ekonomi”* (wawancara pada tanggal 12 April 2023). Diberikannya makanan bergizi setiap hari agar gizi sesuai, sebab kebutuhan untuk lansia butuh juga makanan yang sehat dan kaya akan gizi.

Perataan

Perataan dalam nilai evaluasi dalam suatu program atau kebijakan, agar dapat mencaritahu apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan dengan baik dan merata. Dibagikannya kotak makanan untuk porsi kotak makan kepada penerima program perumahan ini biayanya Rp 11.000,00 per orang. Program perumahan bukan saja upaya untuk membagikan makanan gratis bagi keluarga miskin, lebih dari itu juga sebagai lapangan pekerjaan bagi warga sebab penyuplai

menu makanan tersebut juga dari warga. Sebagaimana ungkapan ketua kelompok masyarakat bahwa: *“Menu berganti setiap 10 harinya dikotak makanannya ada nasi, ikan, sayur atau sop, dan juga air minum semua itu memiliki kandungan bergizi, protein, lemak, mineral, dan akan dibagikan setiap harinya”* (wawancara pada tanggal 12 April 2023).

Selain untuk keluarga miskin penerima bantuan permakanan, kelompok disetiap wilayah dipilih untuk menyidiakan permakanan, begitu juga dengan petugas kirimnya juga dari warga. Jadi, program permakanan ini benar-benar memberikan efek besar bagi warga sekitar.

Responsivitas

Responsivitas didalam penilaian evaluasi ialah, mengetahui tanggapan para penerima yang mendapati bantuan makanan, sebagaimana hasil kebijakan membuat nilai dan memuaskan berbagai tanggapan para penerima bantuan mengenai penerapan program Peraturan Walikota No 134 Tahun 2022 ini. Seperti yang diungkapkan ketua kelompok masyarakat bahwa: *“Respon warga merasa bersyukur dikarenakan mendapatkan permakanan”* (wawancara pada tanggal 12 April 2023).

Penerima program permakanan tersebut mendapatkan makanan yang dikirim langsung setiap hari di rumah mereka untuk menjamin pemenuhan gizi setiap harinya dan pemberian menu berbeda setiap harinya, banyak warga RT sekitar mengapresiasi program yang dijalankan Pemerintah Kota Surabaya. Ungkapan Ibu Nasiatini lansia berusia 66 tahun tentang program permakanan: *“Bagi saya program ini sangat membantu keluarga kami diberikannya bantuan makanan yang dikirimkan setiap harinya”* (wawancara pada tanggal 12 April 2023).

Tanggapan bagi para penerima bantuan permakanan lainnya: *“Dengan adanya permakanan saya merasakan banyak manfaatnya karena dibantu segi ekonomi”* (wawancara bersama Bu Sulasmi lansia 68 tahun, pada tanggal 12 April 2023).

“Program permakanan ini sangat membantu bagi saya karena mendapatkan makanan gratis setiap harinya” (wawancara bersama Bu Katemi lansia 77 tahun, pada tanggal 12 April 2023).

“Sangat membantu saya karena tidak mempunyai penghasilan dan diberikan makanan gratis” (wawancara bersama Pak Tohir lansia 68 tahun, pada tanggal 12 April 2023).

“Sangat Bermanfaat” (wawancara bersama Bu Aidawati lansia 77 tahun, pada tanggal 12 April 2023).

Ketepatan

Ketepatan dalam hal ini digunakan menacaritahu apakah hasil yang diperoleh tercapai dan bermanfaat atau melainkan sebaliknya, dalam evaluasi kriteria ketepatan sebagai menilai keberhasilan pada program apakah sudah tepat program tersebut dengan. Bahwa sasaran yang disebutkan untuk pemberian permakanan dalam pelaksanaan program permakanan di Kelurahan Wonorejo berpacu dengan yaitu, Pedoman Permakanan Perwali Nomor 134 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa sasaran yang disebutkan untuk pemberian permakanan yang tercantum 3 kriteria lansia, paca, dan yatim/piatu. Dalam wawancara bersama petugas

Kelurahan Wonorejo bahwa: *“Pengajuan dari RT/RW harus tercantum 3 kriteria lansia, penyandang cacat, yatim/ piatu, dari RT/RW ada laporan kepada kelurahan, kelurahan melakukan survei, setelah survei diajukan kepada kecamatan yang dituju kepada Dinas Sosial, setelah disetujui DINSOS keluarlah NIPM”* (wawancara pada tanggal 12 April 2023)

Demi menjamin warga mendapatkan makanan kaya gizi dan layak bagi semua warga penerima manfaat permakanan agar tepat sasaran. Untuk pengiriman paket permakanan yang dibagikan setiap hari. Sebagaimana ungkapan ketua kelompok masyarakat: *“Ada petugas masak dipagi hari dan petugas kirim mengirim kotak makanan pada siang hari jam 10, disaat puasa program permakanan masi berjalan tetapi jadwal pengirimannya berubah”* (wawancara pada tanggal 12 April 2023).

Kelompok masyarakat Kelurahan Wonorejo sebagai yang menangani, memasak, dan distribusi yaitu, pemberdayaan dan pelibatan warga dalam mendistribusikan dan pengiriman paket makanan pada sasaran para penerima bantuan permakanan. Ada beberapa tahapan ketika akan mengusulkan penerima permakanan baru ke kelurahan. Mulai memasukan usulan penerima permakanan ke dalam data hingga melakukan verifikasi, kemudian apabila lolos kriteria lansia, penyandang cacat, yatim/ piatu, usulan disampaikan kecamatan yang dituju kepada Dinas Sosial. Sebagaimana ungkapan petugas Kelurahan Wonorejo: *“Jika memenuhi dan mendapatkan NIPM penerima tersebut namanya masuk kedalam data dikirim kepada kelompok masarakat untuk mendapatkan makanan mulai tanggal 1 bulan depan”* (wawancara pada tanggal 12 April 2023). Sebagaimana prosedur dalam pengajuan bantuan permakanan di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan, penulis melakukan analisis Evaluasi Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Wonorejo Surabaya. Sifat evaluasi sendiri adalah suatu kegiatan atau aktivitas penilaian program atau kebijakan publik dari awal perumusan program, pelaksanaan, dan hasil akhir program yang dilaksanakan secara sistematis apakah telah sesuai dengan apa yang menjadi sasaran dan tujuan program tersebut. Oleh karena itu pembahasan ini mengacu pada pendekatan teori dari William Dunn yang menyebutkan bahwa ada 6 (enam) indikator kriteria evaluasi.

Efektivitas

Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu program mencapai taraf tercapainya tujuan, atau keberhasilan mencapai tujuan. Efektivitas, sangat dekat dengan ukuran tugas hasil, dapat diukur dari usahanya bisa dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuan. Tujuan Program Permakanan sendiri dalam Perwali Nomor 134 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian Permakanan bagi lanjut usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, di Kota Surabaya. Bantuan pemberian makanan di Kelurahan Wonorejo telah sesuai dengan tujuan yang ada pada perwali tentang pedoman pelaksanaan permakanan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat dimana sangat terbantu dengan adanya program permakanan ini. Para penerima manfaat bisa juga menghemat

pengeluaran yang biasanya penghasilan mereka untuk membeli makanan dapat dialihkan pada kebutuhan lainnya.

Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah dalam usaha yang diperlukan agar menghasilkan dampak tertentu di tingkat efektivitas. Efisiensi, yang merupakan dari pemanfaatan sumber daya dalam memaksimalkan proses produksi barang maupun jasa. Kriteria efektivitas maupun efisiensi keduanya sangat berkaitan. Pada suatu program nilai efektivitas merujuk seperti hasil yang telah dicapai, sedangkan efisiensi merujuk kepada bagaimana cara mencapai hasil tersebut dengan sumber daya memaksimalkan proses pengerjaan/ pengelolaam untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam pemberian makanan di wilayah wonorejo, sumber daya yang utama ialah sumber dana yang terdapat pada APBD Kota Surabaya Dinas Sosial Surabaya selanjutnya dikirim kepada (POKMAS) Kelompok Masyarakat untuk dikelola dan didistribusikan dalam bentuk makanan. Adanya kendala dalam akhir tahun 2022 yang dimana dulunya para penerima manfaat permakanan terdapat 175 jiwa lansia, dan di tahun 2023 berkurang menjadi 111 jiwa lansia penerima bantuan, adanya informasi mengenai lansia yang hidup sendiri atau lansia tunggal akan diberi bantuan langsung oleh pusat tapi keliatannya tidak ada bantuan yang diberi oleh pemerintah pusat (Kemensos) jadi keluhan verivikasi ulang kepada Dinas Sosial.

Kecukupan

Kecukupan menurut William Dunn, berkenaan dengan seberapa jauh dampak memuaskan kebutuhan, atau kesempatan dalam memecahkan masalah. Dari segi kecukupan pelaksanaan Program permakanan ini para lansia semua merasa tercukupi dengan pemberian makanan gratis setiap harinya lansia yang tidak memiliki penghasilan merasakan terbantu walau mendapatkan makanan gratis sekali setiap harinya.

Perataan

Kriteria perataan berhubungan dengan adil dan wajar dalam mendistribusikan manfaat kepada sasaran yang dituju. Menurut William Dunn kriteria pemerataan ini berkaitan kepada program dalam membagikan atau mendistribusikan pemberian makanan kepada kelompok sasaran yang dituju secara menyeluruh adil dan juga wajar merata bagi semua penerima. Dari segi pemerataan pembagian bantuan permakanan di wilayah wonorejo didalam pelaksanaannya harus sesuai dengan pedoman permakanan yang disebutkan di Perwai Nomor 134 tahun 2022 sasaran penerima manfaat ada tiga kriteria yaitu seorang lansia, penyandang cacat, dan anak yatim/piatu bersama menu makanan yang diberikan kepada sasaran harus sama rata dengan porsi sejumlah Rp 11.000,00. Menu permakanan akan berubah ubah setiap harinya dan sudah dihitung sesuai takaran gizi untuk pemenuhan gizi penerima manfaat.

Responsivitas

Responivitas untuk mengetahui seberapa jauh suatu kebijakan atau program yang dapat memuaskan kebutuhan, kepada kelompok-kelompok masyarakat. Berjalannya program permakanan di Kelurahan Wonorejo banyak mendapati respon yang baik dari para pelaksana dan para penerima permakanan, ada pula penerima permakanan yang mengapresiasi program yang diberikan oleh Walikota,

tanggapan dari pelaksana yang baik agar dapat berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola memasak dipagi hari dan mengantarkan disiang hari kepada penerima manfaat permakanan.

Ketepatan

Kriteria ketepatan dalam pelaksanaan program permakanan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dikatakan sudah tepat sesuai Peraturan Walikota Nomor 134 Tahun 2022 menyatakan para sasaran dalam pemberian bantuan permakanan merupakan warga miskin yang termasuk dalam kriteria lansia, yatim/piatu, penyandang cacat. Adanya program ini, para penerima merasakan terbantu untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas mengenai Evaluasi Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai efektivitas, dalam kriteria ini pelaksanaan program di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya bisa dikatakan efektif, dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan Peraturan Walikota Nomor 134 tahun 2023 yaitu bertujuan agar program permakanan dapat memenuhi kebutuhan para keluarga miskin dalam upaya pemberian kebutuhan pangan juga membantu para warga Penyandang Kesejahteraan Masalah Sosial (PMKS) di wilayah wonorejo.
2. Dalam segi efisiensi, berjalannya program di wilayah wonorejo masih belum optimal dari hasil lapangan, adanya informasi di tahun 2022 akhir mengenai lansia tunggal akan diberi bantuan langsung oleh Pemerintah Pusat tapi ini ternyata tidak ada bantuan menjadikan ada beberapa kendala pengurangan penerima bantuan permakanan dalam hasil verifikasi, dan juga pada POKMAS dalam beradaptasi penggunaan media online ada kendala dalam pengupload bukti laporan masih perlu beradaptasi lagi agar penerima tidak lagi tidak terverifikasi saat pengiriman laporan.
3. Dalam kriteria kecukupan, program Permakanan di wilayah wonorejo sudah memenuhi kriteria tersebut dilihat dari penyaluran permakanan sesuai dengan sasaran warga wonorejo merasa tercukupi dengan bantuan permakanan.
4. Pemerataan dalam kriteria ini sudah terpenuhi, pada pendistribusian permakanan dikirim tepat sasaran pembagian kotak makan merata porsi yang sama seharga Rp 11.000,00 didalamnya ada berupa nasi, ikan atau daging, dan air minum gelas, dengan porsi yang sama untuk para penerima.
5. Pelaksanaan program permakanan dari kriteria responsivitas ini, para warga wonorejo menungkapkan bantuan permakanan sangat membantu adanya program ini. Dalam kriteria ini program permakanan wonorejo dari kriteria responsivitas sudah dikatakan sudah terpenuhi.
6. Dalam kriteria ketepatan, dalam pelaksanaan program permakanan di wilayah wonorejo dari adanya program ini warga sangat bersyukur, memberikan bantuan bagi penerima dalam memberikan kebutuhan pangan setiap hari. Melihat Peraturan Walikota Nomor 134 Tahun 2022 yang bertujuan agar program pemberian permakanan ini bisa memenuhi kebutuhan para keluarga

miskin di wilayah wonorejo dalam upaya memberikan bantuan makanan gratis setiap hari.

Saran

Diharapkan agar program bantuan permakanan di wilayah wonorejo berjalan terus dan lebih dioptimalkan lagi, dan juga semoga program permakanan bisa berjalan diseluruh daerah di Indonesia:

1. Berjalannya Peraturan Walikota ini sudah berjalan sesuai tujuannya, Para penerima merasa terbantu oleh bantuan sosial yang diberikan.
2. Dari pengelolaan sumber daya lebih ditingkatkan lagi dikarenakan ada sebagian lansia tidak lagi menerima bantuan di tahun 2023 ini.
3. Para penerima bantuan merasa tercukupi atas bantuan makanan yang diberikan, semoga program ini bisa berjalannya.

Dan juga perkembangan jaman akan semakin maju dan juga segala sesuatu sekarang lebih mudah bila menggunakan akses media online, kepada POKMAS semangat dalam beradaptasi penggunaan akses internet. Dan juga semoga program permakanan ini kedepannya berjalan optimal para penerima makananan yang dulunya mendapatkan jatah, kedepannya bisa menerima bantuan makanan sehat dan bergizi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbaruddin, S. (2018). Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Program Permakanan Oleh Dinas Sosial Di Kota Surabaya. *Doctoral Dissertation Universitas Airlangga*, 1–7.
- Akbar, Firyal Mohi, Kurniat 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan*: Ideas Publishing
- Anggara, Sahya 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia
- Ferdinand, D. Y., & Satriawan, Y. S. (2020). Upaya Peningkatan Sistem Operasional Penyediaan Permakanan Di Kecamatan Kalirungkut Surabaya. *Jurnal ABDIRAJA*, 3(2), 18–22. <https://doi.org/10.24929/adr.v3i2.904>
- Hasan, M I. (2022). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Ismariana dan Prabawati. (2020). Evaluasi Program Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Miskin Di Kelurahan Tembok Duku Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. *Jurnal Publika*, 8(4). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/35605/31666>
- Lasman Parulian Purba, Ridho Said A Laurence, M. C. (2020). Peningkatan Kualitas Layanan Program Pemberian Permakanan Lanjut Usia di Kelurahan Semolowaru Surabaya. *Jurnal Bakti Saintek*, 4(2), 33–39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/jbs.1734>
- Miles, Huberman dan Saldana. (2013). *Qualitative Data Analydid: A Methods Sourcebook*. Arizona: Arizina State University.
- Moelong. L J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan walikota Surabaya Nomor 134 Tahun 2022

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2012
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2020
Ramadhan, G., & Studi, M. P. (2018). *EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN PERMAKINAN DI KELURAHAN KREMBANGAN UTARA KECAMATAN PABEAN CANTIKAN KOTA SUURABAYA*.
Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf* (p. 710).